



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HELMI
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA
3. NHK : 977676

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/106 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 277.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 317.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.313.500.000

III. HUTANG Rp. 50.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.313.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.